

LHKPN Dinas PUPR Aceh tahun 2021



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAWARDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 672487

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.060.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 498 m2/360 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 3.000.000.000
2. Tanah Seluas 71 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 497.000.000

1. MOTOR, HONDA ACF1L21B06A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA PICK UP Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV MOBIL PENUMPANG Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 411.215.159

F. HARTA LAINNYA Rp. 137.200.000

Sub Total Rp. 4.105.415.159

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.105.415.159



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD YASIR
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 832284

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 176.770.000

1. Tanah Seluas 518 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.370.000
2. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 88.400.000
3. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 152.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI BR250E Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOTOR, HONDA X1N02Q44LO A/T SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5 E AT (CKD) Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 147.430.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 161.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 637.200.000**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 637.200.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITRI DIANSARI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 820007

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah Seluas 95 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 1255 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HADIAH Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 165.019.891

F. HARTA LAINNYA Rp. 55.000.000

Sub Total Rp. 1.240.019.891

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.240.019.891

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HASRIZAL KURNIA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 869775

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.337.000.000

1. Tanah Seluas 1048 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.048.000.000
2. Tanah Seluas 477 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 289.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 350.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 399.999.352

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.111.999.352

III. HUTANG Rp. ---

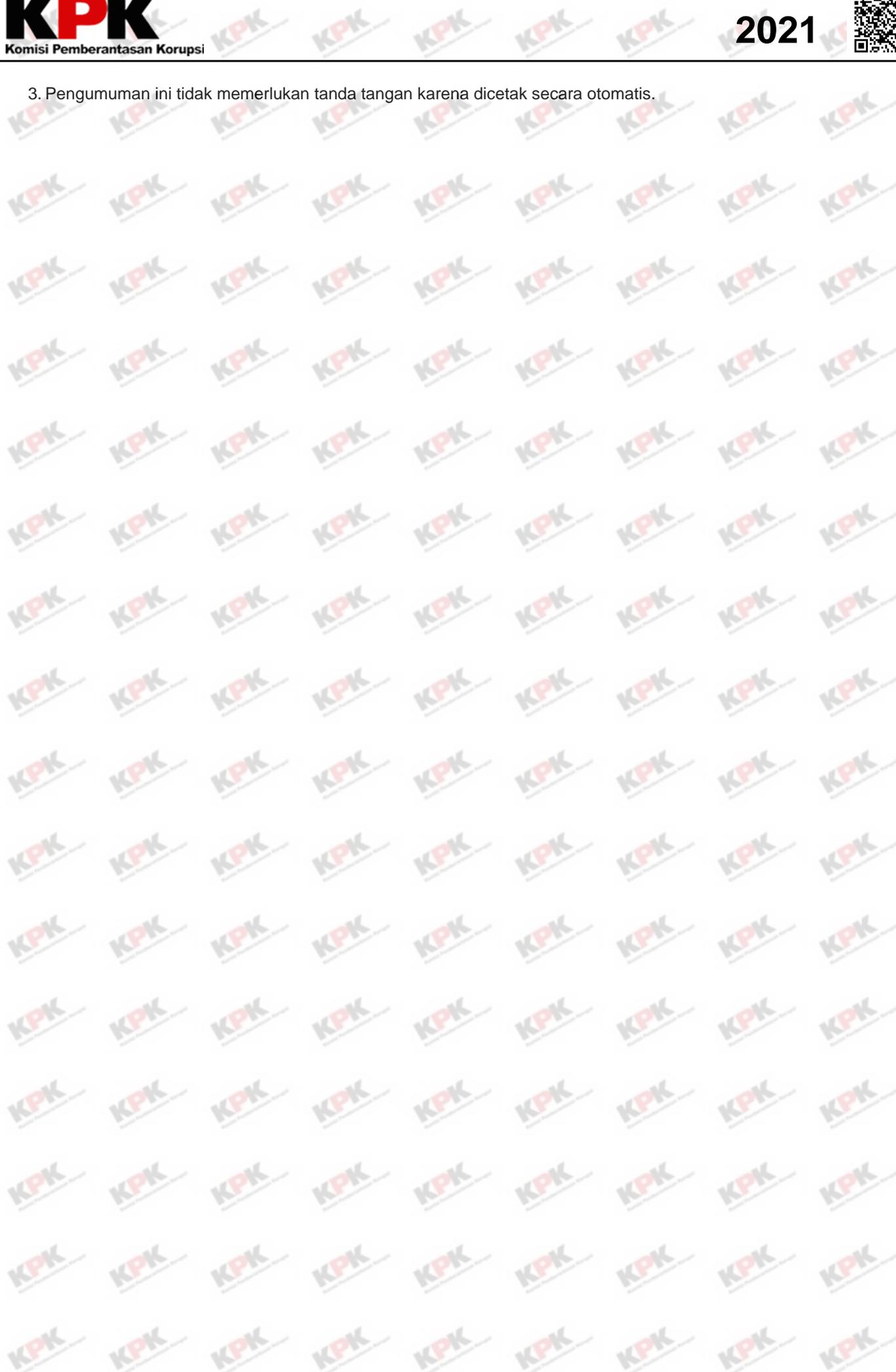
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.111.999.352

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MEDI ARJUNA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **872090**

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | ---- |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 4.000.000 |
| 1. MOTOR, YAMAHA 2 BU AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI | Rp. | 4.000.000 |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 580.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 4.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 8.580.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 39.292.989 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | -30.712.989 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD IQBAL BHARATA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **750711**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.272.000.000**

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
2. Tanah Seluas 803 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 625.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 983 m2/500 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 1.310.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m2/14 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000
6. Tanah Seluas 809 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 164.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 E ATCKD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 145.500.000****D. SURAT BERTHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.156.548.052****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 4.738.048.052**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.738.048.052

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAYAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHIATUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 677651

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.240.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/151 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 930.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/370 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 3.550.000.000
3. Bangunan Seluas 96 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, HONDA NC11B1C A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 105.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.352.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.352.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULYADI
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 677649

II. DATA HARTA

| | | |
|---|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | ---- |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 179.000.000 |
| 1. MOBIL, DAIHATSU JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI | Rp. | |
| 45.000.000 | | |
| 2. MOBIL, HONDA HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI | | |
| Rp. 120.000.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA NC11C1C A/T (SCOOPY) Tahun 2011, HASIL | | |
| SENDIRI Rp. 7.500.000 | | |
| 4. MOTOR, HONDA NC110D AT (VARIO) Tahun 2008, HASIL | | |
| SENDIRI Rp. 6.500.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 141.335.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 108.527.265 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 428.862.265 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 428.862.265 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUZDI MISBACH
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 713898

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.671.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m²/127.5 m² di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 784.000.000
2. Tanah Seluas 82 m² di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 164.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 266.100.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m²/135 m² di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 363.400.000
5. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000
6. Tanah Seluas 2500 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 161.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA E DIESEL Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA NF125 TR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



5. MOTOR, YAMAHA 1PA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 20.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 1.852.500.000 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 1.852.500.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAID ANWAR FUADI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 677652

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.388.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 607 m2/400 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
2. Tanah Seluas 1587 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 1481 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Tanah Seluas 1316 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 169000 m2 di KAB / KOTA ACEH TAMIANG, WARISAN Rp. 338.000.000
7. Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA ACEH TAMIANG, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 12.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA 2 SV / SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2 S6 JUPTER MX / SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 50.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 90.000.000**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 3.540.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 3.540.000.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRA ARIANTO
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 677623

II. DATA HARTA

| | | |
|---|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | ---- |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 348.000.000 |
| 1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000 | | |
| 2. MOTOR, YAMAHA BG 6 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 39.000.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 54.800.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 312.021.651 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 714.821.651 |

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 714.821.651

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Admin Integrasi Data